

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
INFORMASI KEUANGAN DI
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



Oleh
INDASARI MONCONG
NIM 105730537415

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
INFORMASI KEUANGAN DI
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



Oleh
INDASARI MONCONG
NIM 105730537415

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d :11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm :39).

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepadanya:

1. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku
2. Kakak-kakakku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku
3. Keluarga besarku terima kasih atas semuanya.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Kabupaten Gowa."

Nama Mahasiswa : Indasari Moncong
No. Stambuk/NIM : 105730537415
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Amir, S.E., M.Si. AK.CA
NIDN : 0031126404


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NIDN : 0905107302

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA
NIDN : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Indasari Moncong**, NIM **105730537415** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM.
2. Amir, SE., M.Si, Ak., CA
3. Muttiarni, SE., M.Si
4. Agusdwana Suarni, SE., M. ACC | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indasari Moncong

Stambuk : 105730537415

Progra Studi : Akuntansi

Dengan Judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Kabupaten Gowa."

Dengan ini menyatakan bahwa

Skripsi yang saya ajukan kedepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Indasari Moncong

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ismail Rasulong, SE.,MM
NIDN : 0905107302

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badolahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0915058801

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Moncong Tiro dan ibu Darna yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan d dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si. Ak.CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, S.E., M.Si. Ak. CA. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sanyat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Muda-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb



ABSTRAK

Indasari Moncong, Tahun 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Amir ,S.E.,M.Si.AK.CA. dan pembimbing II Ismail Rasulong, S.E.,M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner terhadap 50 responden. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa. Adapun teknis analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier sederhana menggunakan program SPSS versi 24.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Keuangan

ABSTRACT

Indasari Moncong, 2019. The influence of the application of government accounting standards on the quality of financial information in Gowa Regency, thesis accounting study program faculty of economics and business muhammadiyah university of Makassar. Guided by a supervisor I Amir, S.E.,M.Si.AK.CA. and advisor II Ismail Rasulong, S.E.,M.M.

This study aims to assess the implementation of government accounting standards on the quality of financial information in Gowa Regency. The research design used is quantitative. Sampling uses a questionnaire to 50 respondents. The purpose of this study is to determine the effect of implementing government accounting standards on the quality of financial information in Gowa Regency. As for the technical analysis of the data used, namely the validity test, reliability test, and simple linear regression using the SPSS version 24 program.

Based on the results of the study it was concluded that the government accounting standard variables significantly influence the quality of financial information in Gowa Regency.

Keywords: *government accounting standards, quality of financial information.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
	A. Standar Akuntansi Pemerintahan	7
	B. Kualitas Informasi Keuangan	15
	C. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	17
	D. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	18
	E. Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah	20
	F. Penelitian Terdahulu	20
	G. Kerangka Konsep	23
	H. Hipotesis	24
BAB III	METODE PENELITIAN	25
	A. Jenis Penelitian	25
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
	C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	25
	D. Populasi dan Sampel	26
	E. Teknik Pengumpulan Data	27
	F. Teknik Analisis Data	27
	G. Metode Analisis	28
	H. Rancangan Penguji Hipotesis	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
	B. Hasil Penelitian	40
	C. Pembahasan	48
BAB V	PENUTUP	51

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Sampel dan Tinglat Pengembalian kuesioner	38
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden	39
Tabel 4.3	Pendidikan Responden	39
Tabel 4.4	Masa Kerja	40
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Standae Akuntansi Pemerintahan	41
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Keuangan	42
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.8	Model Summary	44
Tabel 4.9	Uji Nilai Signifikan	45
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Hipotesis	46

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	24
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKD	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam pencapaian kinerja yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kebijakan dapat dilakukan pemerintah dengan komunikasi secara langsung dengan masyarakat, upaya ini dilaksanakan untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi di masyarakat. Menurut Apriyono (2010) “pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan *good governance*”.

Pelaksanaan otonomi daerah pihak pemerintah membutuhkan aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah beserta pengelolaan keuangan Negara sehingga pemerintah dapat mewujudkan *Good Governance* yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, di kenal pula istilah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian wewenang pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab serta kebebasan dalam mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam menjalankan wewenang tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang didukung dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi

daerah dan melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Erawati dan Rahmawati, 2016)

Perubahan pada bidang keuangan Negara ini telah menimbulkan reformasi disegala bidang dan juga mengatur mengenai akuntansi pemerintahan untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pemakai melalui proses akuntansi tersebut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparansi perlu adanya standar akuntansi pemerintahan (Renyowijoyo, 2008).

Menurut Yujana 1998, terdapat berbagai perubahan dalam akuntansi pemerintahan dari pembukuan akuntansi pemerintah menggunakan teknik tradisional *basik cash* dengan sistem pencatatan *single entry* kemudian beralih menjadi akuntansi modern. Akuntansi yang menggunakan *basik cash* sistem pencatatannya sederhana tetapi mempunyai kekurangan yaitu kurangnya informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, dilakukan perubahan penerapan akuntansi pemerintahan hal ini dilakukan agar keuangan pemerintah bisa memberikan informasi keuangan yang lebih efektif. Salah satu cara yang dilakukan yaitu mewajibkan sistem yang berbasis baru, yaitu sistem akrual yang akan diterapkan pada setiap instansi pemerintahan di pusat dan daerah.

Pada tahun 2010 tepatnya pada bulan oktober pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Abdullah, 2010). Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang diatur pada pasal 36 ayat 1 yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun.

Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan terpenting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik Negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasi dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia.

Menurut Batubara (2006) penerapan *good governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ganie-Rochman (Widodo, 2012, 18) konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tapi juga peran berbagai faktor di luar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Adapun pendapat dari Pinto dalam Nisjar (2011:119) yaitu *governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (2010) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik, memiliki kriteria yang berkemampuan transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa. Dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Sedangkan lembaga administrasi Negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Perlu adanya pemerintahan yang partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab pada semua level pemerintahan atau pemerintahan yang *good governance* apalagi dengan adanya undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan. Jadi *good governance* di sini, dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan oknum yang membuat kesalahan, penyimpangan atau penyelewengan atas penggunaan keuangan kemudian memberikan sanksi, melainkan tersedianya keuangan yang cukup, memelihara segala fasilitas yang

berkaitan dengan keuangan serta menjamin agar pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan terlaksana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Good governance dalam pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk menjamin supaya sumber-sumber dan penggunaan keuangan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *good governance* pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dapat terwujud menjadi kenyataan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, penulis jabarkan berdasarkan pada sasaran dan pertimbangan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang ekonomi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi jurusan akuntansi yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan. Dan bagi pembaca, menambah wawasan agar bisa mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Menurut Mardiasmo (2004), Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian,2010). Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi yang pertama di Indonesia adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini sangatlah penting karena laporan akuntansi keuangan suatu daerah bisa saja berbeda-beda dan akan menimbulkan berbagai persoalan.

Menurut undang-undang perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut yaitu penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan

pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi baik kas maupun non kas dan mencatat aset dan kewajiban (Usman,2014).

Diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo, 2015).

Salah satu langkah yang ditempuh untuk pengelolaan keuangan Negara yang transparan adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Ningtyas, 2015).

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen, yang ditetapkan melalui keputusan presiden tentang komite standar akuntansi

pemerintahan sehingga peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten /Kota maupun propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Mentu, 2016).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

KSAP menyampaikan konsep peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan kepada menteri keuangan untuk memproses penetapan menjadi peraturan pemerintah. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan serta pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik karena dapat memunculkan suatu transparansi, partisipasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah maupun Negara. SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) oleh Komite. Proses penyiapan SAP yang digunakan ini berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami serta melaksanakan standar yang ditetapkan.

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. *Stakeholders* yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah (eksekutif)
2. DPR/DPRD (legislatif)
3. Investor
4. Kreditor
5. Masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.

Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan di maksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar. Terdapat beberapa prinsip dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (pp N0.71 Tahun 2010).

Begitupun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*).

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan, periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode keperiode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidak pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Tujuan dan sasaran akuntansi pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan yang berkaitan dengan perwakilan pemerintah.

B. Kualitas Informasi Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevan

★ Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

C. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2009:105) adalah laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Sundjaja dan Barlian (2008 : 25) mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan menurut Munawir (2004 : 2) adalah laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan aktivitas suatu perusahaan.

Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

D. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Robert dan Vijay (2005) mengatakan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang dilandasi oleh adanya hubungan antara output yang dihasilkan dari sebuah tanggung jawab beserta tujuan. Sistem akan dikategorikan efektif apabila outputnya dihasilkan dari beberapa individu/kelompok dengan berdasarkan tujuan yang direncanakan.

Menurut Robert dan Vijay diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu penerapan standar akuntansi pemerintahan efektif, ketika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (LKPP) begitu pula laporan keuangan daerah (LKPD) yang bersifat transparansi dan

juga akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga akan terciptanya keyakinan yang memadai demi tercapainya efektivitas. Sistem pengendalian internal dalam lingkup pemerintahan disebut Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008, pasal 1 no.2).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008, Pasal 1 no.1)

Terdapat beberapa komponen dalam suatu pengendalian internal pemerintah yang baik menurut Moeller dan Robbert (2009), sebagai berikut:

1. Penilaian risiko
2. Lingkungan pengendalian
3. Informasi dan komunikasi
4. Pemantauan
5. Aktivitas pengendalian.

E. Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintahan adalah suatu prinsip akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintahan adalah sebuah persyaratan yang memiliki kekautan dari segi hukum sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah khususnya di Indonesia.

Menurut N deddi dalam Irvan Permana (2011). Berpendapat bahwa terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yakni standar akuntansi pemerintahan (SAP) diberlakukan di lingkungan pemerintahan pusat dan departemennya begitupun di pemerintahan daerah dan dinasny. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan begitu pula di daerah.

Menurut pendapat N Deddi sebelumnya ditarik sebuah kesimpulan yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berakibat baik pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat maupun di daerah. Olehnya itu, informasi keuangan daerah akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam pemerintahan demi terwujudnya sikap transparansi dan akuntabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Merlina Marcori Ludani, (2017). "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (suatu Studi pada Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan)". Hasil Penelitian ini akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah sudah mulai bagus. Hasil ini dibuktikan dengan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara berturut-turut mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Jadi dalam Akuntansi WTP itu sudah yang paling baik dalam sistem Pengelolaan Keuangan.

Indrawati (2012). "Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka mewujudkan *clean governance*". Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan Negara yang bertumpu pada tatanan *good governance* adalah pengelolaan keuangan yang bernuansa solid, bertanggungjawab, efisien dan efektif, serta diselenggarakan secara partisipatif.

Tua. S Manuppan Bangun, (2015). "pengaruh *Good Governance*. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan (studi empiris pada SKPD kota Dumai)". Berdasarkan penelitian ini secara keseluruhan adalah 0,771 yang memperhatikan bahwa 77,1% kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dan sisanya 22,9% oleh variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur.

Intihana & Nur Hafifa Mutia S (2017). "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Good Governance* Terhadap Kinerja pemerintah daerah (studi pada Dinas Kesehatan Kota Kendari)". Hasil pembahasan penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas kesehatan kota kendari.

Danel Kartika A & Suhardjo Y, (2013). "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tual)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ritno H. Rondonuwu, (2015). "Analisis Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Minahasa". Hasil penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga dinas yang sebelumnya dalam lingkup dinas pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan setelah merger tahun 2008 menurut peraturan daerah kabupaten minahasa N0.63 Tahun 2008, dan kembali dipisahkan tahun 2014 dengan peraturan daerah kabupaten minahasa No.5 Tahun 2014.

Ni Made Asih Ristanti, (2014). "Pengaruh Sistem Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten tabanan)". Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan pertama, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten tabanan. Kedua, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten tabanan.

Titiek Puji Astuti & Yulianto (2016). “*Good Governance* Pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya undang-undang No.6 tahun 2014”. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mendukung terwujudnya tatakelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Umar Sako, Felmi D Lantowa Tahun 2018, Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah kabupaten gorontalo. Didapatkan hasil dari penelitian bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

G. Kerangka Konsep

Penelitian ini melalui kerangka konsepnya pada masalah pokok pada pengelolaan keuangan. Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Penganalisaan standar akuntansi pemerintahan (2010 : 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pada akhir dari penelitian ini dapat kesimpulan serta implikasi manajerialnya yang dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil kegiatan

penelitian serta beberapa masukan kepada pihak kantor badan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan agar lebih baik lagi.

Agar lebih jelasnya kerangka konsep penulis uraikan dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar : 2.1

Kerangka Konsep



H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengajukan hipotesis yang dihadapi perusahaan sebagai berikut :

Diduga bahwa Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang berbentuk kuantitatif dimana data kuantitatif berupa angka-angka, tabel-tabel dan sebagainya yang sedikit banyak menggunakan matematika. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan yang diteliti berupa laporan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait pada judul penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu Mei hingga Bulan Juli 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Definisi operasional

Definisi Operasioanal variabel digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda yaitu dengan memberikan batasan-batasan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Variabel

a. Variabel bebas, Standar Akuntansi Pemerintahan (X) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, indikatornya adalah:

- 1) Basis akrual
- 2) Nilai historis

3) Substansi mengungguli bentuk formal

4) Priodisitas

5) Pengungkapan lengkap

b. Variabel terikat, Kualitas Informasi Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, indikatornya adalah:

1) Relevan

2) Andal

3) Dapar dibandingkan

4) Dapat dipahami

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Populasi penelitian adalah Kepala bidang serta beberapa staf pelaporan keuangan sebagai responden pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dan adapun beberapa masyarakat Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah 50 populasi yang akan dijadikan sampel pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literature-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lainya yang berhubungan erat dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan suatu lembar isian yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada Kepala bidang, Staff dan Masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini untuk memberikan nilai ataupun skor dari pernyataan-pernyataan yang diajukan menggunakan skala *likert*.

Dalam mengukur pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan, maka dilakukan perhitungan rata-rata jawaban berdasarkan skor setiap jawaban dari responden. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Keuangan

X = Variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e = *error*

G. Metode Analisis

1. Uji kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013).

Tujuan dari uji validitas yaitu untuk melihat alat ukur yang digunakan telah sesuai dengan apa yang akan diukur. Koefisien validitas akan memperlihatkan kemampuan instrument dalam memberikan data maupun informasi dari variabel yang telah diukur. Pengujian validitas ini akan dilihat signifikansinya sebesar 5% untuk melihat eratnya pengaruh variabel terikat dengan mengkorelasikan antara skor item dari pertanyaan keseluruhan terhadap skor total. Item akan dikatakan valid ketika memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05. (Arikuntum, 2002).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat alat ukur dapat menunjukkan ketepatan, akurat, stabil, dan konsistensi dalam indikasi tertentu dari suatu kelompok individu, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Ketika dilaksanakan uji ini melibatkan pernyataan-pernyataan yang telah dinilai valid. Dalam penelitian ini menggunakan *cronbach alpha* dari setiap instrument. Dapat dikatakan reliabel ketika nilai *cronbach alpha* nya diatas dari 0,60.

H. Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik yang berfungsi sebagai penguji hipotesis. Pengukuran tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dalam melihat diterima atau ditolak akan dilakukan uji F. dalam menguji variabel independen akan dilakukan uji t (parsial) dengan signifikansi sebesar 5% atau dibawah 0,05.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada Januari 2017 berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah serta peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Badan Penelolan Keuangan Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang terbentuk pada awal tahun 2009 yang merupakan gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu dinas pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor Pendapatan Daerah dan Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang belanja daerah, penatausahaan dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Latar belakang terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerha Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang tugas

pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tupoksi disektor pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang perencanaan, perbelanjaan daerah, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien telah ditetapkan aturan bagi para pemegang jabatan struktural maupun non struktural sebagai perangkat daerah dan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan Ibu kota Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa otonomi daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten /kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh *stakeholders* dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya pengelolaan keuangan yang handal dan akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintah yang baik”

b. Misi

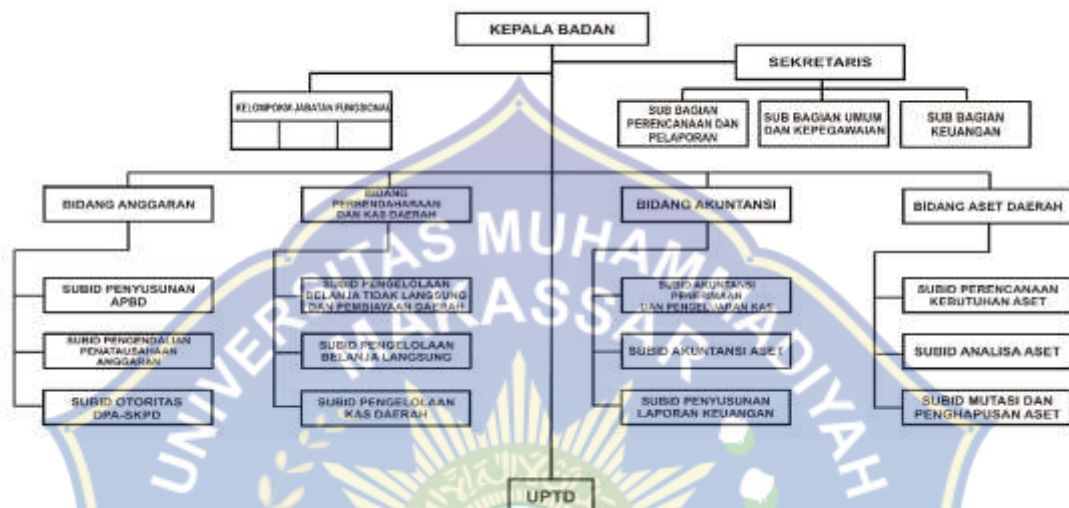
Mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan
- Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
- Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

a. Struktur Organisasi

Gambar: 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa (2019)

b. *Job Description*

Deskripsi kegiatan umum dari setiap bidang dalam badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa adalah sebagai berikut:

1) Bidang anggaran

- a) Mengatur urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD.
- b) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD.

- c) Melaksanakan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah.
 - d) Melaksanakan penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun standar biaya umum.
 - e) Melaksanakan penyusunan anggaran kas daerah dan menerbitkan surat penyediaan dana (SPD).
 - f) Melaksanakan penerbitan hukum pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD dan surat penyediaan dana.
 - g) Melaksanakan pengendalian dan penatausahaan anggaran.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- a) Mengatur urusan pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, pengelolaan belanja langsung dan pengelolaan kas daerah.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, pengelolaan belanja langsung dan pengelolaan kas daerah.
 - c) Melaksanakan pengkajian penatausahaan anggaran daerah.
 - d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengeluaran kas daerah (*cash out flow*).
 - e) Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- f) Melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan.
- g) Melaksanakan pengendalian penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Akuntansi

- a) Mengatur urusan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan penyusunan laporan keuangan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan penyusunan laporan keuangan.
- c) Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang akuntansi.
- d) Melaksanakan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, sistem informasi keuangan.
- e) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan.
- f) Melaksanakan penyampaian laporan keuangan yang *auditable* secara berkala beserta perinciannya, baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai dalam rangka mengembangkan sistem informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan.

- h) Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi yang manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Aset Daerah

- a) Mengatur urusan perencanaan kebutuhan aset, analisa aset dan mutasi serta penghapusan aset.
- b) Mengkordinasikan dan mengevaluasi perencanaan kebutuhan aset, analisa aset serta mutasi dan penghapusan aset.
- c) Melaksanakan perumusan dan pengendalian jumlah kebutuhan aset pada masing-masing SKPD dan lembaga terkait dalam rangka perencanaan kebutuhan aset daerah.
- d) Melaksanakan rumusan pelaksanaan *inventarisasi*, pencatatan dan penilaian aset daerah.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi kerja terkait dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
- f) Melaksanakan rumusan pelaksana pemeriksaan, pemanfaatan, pengamanan, pemusnahan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- g) Melaksanakan perumusan dalam rangka penyusunan standarisasi satuan harga barang milik daerah dan standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah kabupaten gowa.
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data dan Responden Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Total kuesioner yang dibagikan sebanyak 56, dan total yang dikembalikan oleh responden yaitu berjumlah 50. Hal ini terjadi karena responden sedang berada diluar kantor sejak kuesioner dibagikan. Lama pengisian kuesioner adalah satu minggu. Didapatkan juga kuesioner yang rusak, oleh karena itu jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 kuesioner.

Tabel: 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	56
Kuesioner yang kembali	50
Kuesioner yang tidak kembali	6
Kuesioner yang bisa diolah	50
Tingkat pengembalian (<i>Response rate</i>)	89%

Dilihat dari Tabel 4.1, penyebaran kuesioner sebanyak 56 kemudian yang berhasil dikumpulkan hanya sebanyak 50 kuesioner. Dari 100% penyebaran kuesioner yang dapat diolah adalah sebesar 89%, kemudian yang tidak kembali adalah 11% atau sebanyak 6 kuesioner. Dari kuesioner

yang kembali menandakan pengembalian kuesioner sudah sangat tinggi karena kerjasama yang baik dengan pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Tabel: 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Persentase
Laki-laki	29	58%
Perempuan	21	42%
Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner penelitian setelah diolah, 2019

Dilihat dari Tabel 4.2. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 29 orang atau mempunyai persentase sebesar 58%, kemudian responden perempuan sebanyak 21 atau dengan persentase sebesar 42%. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam pengisian kuesioner ini adalah laki-laki.

Tabel: 4.3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	persentase
S1	40	80%
S2	10	20%
S3	0	0
Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner penelitian setelah diolah, 2019

Dilihat dari Tabel 4.3. disimpulkan bahwa yang mengisi kuesioner dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 40, atau dengan persentase sebesar 80%, dan yang mengisi responden dengan jenjang pendidikan S2 adalah sebanyak 10 orang, atau sebesar 20%.

Tabel: 4.4
Masa Kerja

Lama Bekerja	Absolut	Persentase
≤ 5 Tahun	30	60%
> 5 Tahun	20	40%
Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner penelitian setelah diolah,2019

Dilihat dari Tabel 4.4 disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner dengan masa kerja dibawah 5 tahun adalah 30 orang atau sebesar 60%, kemudian responden yang mengisi kuesioner dengan masa kerja diatas 5 tahun adalah sebanyak 20 orang atau sebesar 40%.

2. Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada didalam kuesioner mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2001). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar sekor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Setelah itu tentukan hipotesis H_0 : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor H₁ : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis H_0 dan H_1 , kemudian uji dengan membandingkan r hitung (tabel *corrected item-item correlation*) dengan r tabel (tabel *product moment* dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* (df)=n-2, dimana “n” adalah jumlah sampel penelitian sebanyak 50 responden sehingga diperoleh nilai (df)= 50-2 atau nilai df dari 48 adalah 0,279. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel (Ghozali, 2001:45). Hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel: 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan(X)

Pernyataan	Variabel	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Standar Akuntansi Pemerintahan	0.427	0,279	Valid
2	Standar Akuntansi Pemerintahan	0.361	0,279	Valid
3	Standar Akuntansi Pemerintahan	0.456	0,279	Valid
4	Standar Akuntansi Pemerintahan	0.316	0,279	Valid
5	Standar Akuntansi Pemerintahan	0.570	0,279	Valid

Sumber: Hasil penelitian yang diolah,2019

Tabel: 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Keuangan (Y)

Pernyataan	Variabel	r hitung	r tabel	kesimpulan
1	Kualitas Informasi Keuangan	0.641	0,279	Valid
2	Kualitas Informasi Keuangan	0.602	0,279	Valid
3	Kualitas Informasi Keuangan	0.617	0,279	Valid
4	Kualitas Informasi Keuangan	0.693	0,279	Valid
5	Kualitas Informasi Keuangan	0.809	0,279	Valid

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut menjelaskan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan n 50 (angka 50 karena jumlah responden adalah 50), maka r tabel sebesar 0,279. Hal ini berarti bahwa nilai *pearson correlation* lebih besar dari r tabel maka semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang dikur pada kuesioner tersebut.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat alat ukur dapat menunjukkan ketepatan, akurat, stabil, dan konsistensi dalam indikasi tertentu dari suatu kelompok individu, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang

terpisah. Ketika dilaksanakan uji ini melibatkan pernyataan-pernyataan yang telah dinilai valid. Dalam penelitian ini menggunakan *cronbach alpha* dari setiap instrument. Dapat dikatakan reliabel ketika nilai *cronbach alpha* nya diatas dari 0,60.

Tabel: 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	<i>Cronbach Alpha</i>
Standar Akuntansi Pemerintahan	5 Item	0,662
Kualitas Informasi Keuangan	5 Item	0,855

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena α hitung $> 0,6$. Pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki α hitung $0,662 > 0,6$ dan variabel Kualitas Informasi Keuangan memiliki α hitung $0,855 > 0,6$.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan struktur model. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 50 responden pada BPKD Kabupaten Gowa, diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (X), dan Kualitas Informasi Keuangan (Y). hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada hasil analisis regresi dari data.

a. Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan variabel.

Tabel: 4.8

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628	.395	.382	1.633

a. Predictors: (constant), X

Nilai R yang merupakan simbol dari koefisien pada tabel 8 nilai korelasi adalah 0,628. Menunjukkan bahwa derajat hubungan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 62,8%. Artinya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan terhadap Kualitas Informasi Keuangan sebesar 62,8%.

Melalui tabel tersebut juga diperoleh R Square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,395 artinya kualitas informasi keuangan sebesar 39,5%, dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga

dapat ditafsirkan bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh sebesar 39,5%. Terhadap kualitas informasi keuangan.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F-test)

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah modal regresi dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas perusahaan atau tidak. Berikut ini hasil uji statistik:

Tabel: 4.9
Uji Nilai Signifikan
(ANOVA)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.522	1	83.522	31.321	,000
	Residual	127.998	48	2.667		
	Total	211.520	49			

- a. Dependent Variable: Y
b. Predictors (Constant), X

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 didapat nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05 artinya model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan di BPKD kabupaten gowa.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji T-test)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel: 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis
(Coefficients)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(constant)	6.489	2.667		2.433	,019
X		.709	.127	.628	5.597	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan koefisien regresi sederhana tersebut mempengaruhi nilai koefisien konstanta adalah sebesar 6.489 koefisien variabel independen (X) adalah sebesar 0,709. Sehingga diperoleh persamaan regresi $Y=6,489+0,709X$.

Koefisien regresi sebesar 0,709 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas informasi keuangan sebesar 70,9% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

C. Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu standar akuntansi pemerintahan (X), sedangkan variabel dependennya adalah kualitas informasi keuangan (Y). pengujian hipotesis antar variabel independen dan dependen dilakukan melalui SPSS 24 selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hipotesis sebagai berikut:

Pengujian secara parsial yang kedua antara variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai koefisien (β) untuk X adalah 0,709. Berdasarkan rumusan hipotesis terhadap pengujian secara parsial ditentukan bahwa jika $\beta_2 \neq 0$: H_0 ditolak dan menerima H_a artinya Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

Pada tahun 2005, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai

dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan, artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Keuangan Kabupaten Gowa. Dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam menyusun laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kartika (2013) dengan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan Kota Tua. Melalui uji F diketahui bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun koefisien determinasinya sebesar 0,957 yang berarti bahwa model regresi yang dibangun mampu menjelaskan sebesar 95.7% variabilitas kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Kabupaten Gowa.

B. Saran

Adapun saran kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan yang selengkap mungkin dan di sajikan secara jujur agar yang bersangkutan dengan mudah dapat memahami laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, syukri. 2010. Telaah Reformasi Akuntansi Pemerintah (Menuju Basis Akrua) Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Lika Liku Kuliah*.
- Apriyono, Andri. 2010. Arti Penting Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Bastian I, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga : Yogyakarta.
- Kartika & Suhardjo. 2013. *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual)*. *Jurnal stie semarang*, vol 5, No 3.
- Intihanan & Nur Afifa Muthia S. 2017. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari)*.
- Indrawati. 2012. *Prinsip good governance financial governance dalam pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan clean governance*. (Vol: XVII NO.3 Tahun 2012). Universitas Airlangga.
- Ludani, Melina Marcori, dkk. 2017. Renyowijoyo, Mulindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Mitra Wacana. Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Krual*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan, Fokusmedia, Bandung*
- Renyowijoyo, mulindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Mitra Wacana. Jakarta
- Rondonuwu, R.H, 2015. *Analisis evisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten manahasa*. *Jurnal EMBA* (Vol: 3 No. 4 Desember 2015). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk penelitian*. Edisi-Revisi, Cetakan 12. Penerbit CV. Afabeta. Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi pemerintah Daerah. Konsep dan Aplikasi*. Cetakan kedua. Alfabeta. Bandung.
- Tua. S Manuppa Bangun, 2015. *Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas*

Informasi laporan keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai). Jom FEKOM Vol.2, No.2 Oktober 2015.

Umar S & Falmi D.L 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jurnal Of Accounting Science (Vol. 2 No. 1 Januari 2018). Universitas muhammadiyah Gorontalo.*

Yujana, Lalu Hendry. 1998. *Akuntansi Pemerintahan. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.*



Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

A. Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Kabupaten Gowa”**, dengan melakukan studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Identitas Responden

1. Nama : (Boleh dirahasiakan)
2. Jenis Kelamin : laki perempuan
3. Pendidikan : S1 S3
 S2
4. Masa Kerja : ≤ 5 tahun
 >5 tahun

C. Petunjuk Pengisian

Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan. Setiap pernyataan disediakan alternatif yang sesuai dengan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara, dengan cara memberi tanda (✓).

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

Kuesioner tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

No.	Pernyataan	penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Basis Akrua						
1	Penerapan basis akrual untuk pengakuan asset dalam Neraca Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.					
Nilai Historis						
2	Asset dicatat sesuai dengan nilai wajar dalam Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.					
Substansi Mengungguli Bentuk Formal						
3	Menyajikan dengan wajar transaksi yang seharusnya disajikan, maka transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan pada Badan Pengeolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.					
Periodisitas						
4	Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dilaporkan sesuai dengan periode pelaporan yang ditentukan.					
Pengungkapan Lengkap						
5	Laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.					

Kuesioner tentang Kualitas Informasi Keuangan (Y)

No.	pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Relevan						
1	Laporan keuangan dalam catatan asset laporan keuangan disajikan dengan lengkap.					
2	Informasi laporan keuangan membantu pengguna dalam memprediksi kinerja keuangan dimasa mendatang.					
Andal						
3	Informasi laporan keuangan disajikan secara jujur/wajar					
Dapat dibandingkan						
4	Informasi keuangan disajikan oleh instansi/lembaga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
Dapat dipahami						
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga dapat dipahami oleh penggunanya.					

Lampiran 2 : Matriks Tabulasi Data

No.	Standar Akuntansi Pemerintahan					Total	Kualitas Informasi Keuangan					Total
	P1	P2	P3	P4	P5	X	PY.1	PY.2	PY.3	PY.4	PY.5	Y
1	5	4	5	5	5	24	5	5	5	4	5	24
2	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
3	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	5	22
4	4	5	5	5	4	23	5	5	4	4	5	23
5	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
6	5	3	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	23
8	5	4	4	5	4	22	4	4	5	4	4	21
9	4	5	3	5	5	22	4	4	4	4	4	20
10	4	5	4	5	5	23	5	4	5	5	5	24
11	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
12	5	3	5	1	5	19	5	5	5	5	5	25
13	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	23
14	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
15	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
16	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	25
17	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
19	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
23	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
27	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	4	21
28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
30	5	3	4	5	5	22	5	5	4	5	5	24
31	4	4	4	5	5	22	4	5	5	5	5	24
32	5	4	5	4	5	23	5	5	4	4	5	23
33	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20
34	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20
35	4	5	4	4	5	22	4	5	5	4	4	22
36	4	5	4	4	5	22	4	5	5	4	4	22
37	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20

38	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
41	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
43	5	4	5	5	5	24	5	5	5	4	5	24
44	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	23
46	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
47	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	3	16
48	4	3	3	4	4	18	4	5	3	3	5	20
49	4	3	4	4	3	18	5	5	4	5	5	24
50	4	3	4	4	4	19	4	4	3	3	4	18



Laporan 3 : Olah Data SPSS

1. Validitas dan Reliabilitas

Variabel X

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5
P1	Pearson Correlation	1	.046	.543**	.145	.516**
	Sig. (2-tailed)		.751	.000	.314	.000
	N	50	50	50	50	50
P2	Pearson Correlation	.046	1	.270	.346*	.312*
	Sig. (2-tailed)	.751		.058	.014	.028
	N	50	50	50	50	50
P3	Pearson Correlation	.543**	.270	1	.089	.405**
	Sig. (2-tailed)	.000	.058		.541	.004
	N	50	50	50	50	50
P4	Pearson Correlation	.145	.346*	.089	1	.293*
	Sig. (2-tailed)	.314	.014	.541		.039
	N	50	50	50	50	50
P5	Pearson Correlation	.516**	.312*	.405**	.293*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.028	.004	.039	
	N	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.662	.678	5

Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1.000	.046	.543	.145	.516
P2	.046	1.000	.270	.346	.312
P3	.543	.270	1.000	.089	.405
P4	.145	.346	.089	1.000	.293
P5	.516	.312	.405	.293	1.000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.192	4.020	4.320	.300	1.075	.014	

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	16.64	2.439	.427	.438	.606
P2	16.94	2.384	.361	.247	.636
P3	16.82	2.436	.456	.368	.596
P4	16.74	2.278	.316	.170	.670
P5	16.70	2.214	.570	.373	.541

Variabel Y

Correlations

		PY.1	PY.2	PY.3	PY.4	PY.5
PY.1	Pearson Correlation	1	.604**	.390**	.475**	.652**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
PY.2	Pearson Correlation	.604**	1	.398**	.338*	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.016	.000
	N	50	50	50	50	50
PY.3	Pearson Correlation	.390**	.398**	1	.688**	.527**
	Sig. (2-tailed)	.005	.004		.000	.000
	N	50	50	50	50	50
PY.4	Pearson Correlation	.475**	.338*	.688**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.000		.000
	N	50	50	50	50	50
PY.5	Pearson Correlation	.652**	.671**	.527**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.855	.856	5

Inter-Item Correlation Matrix

	PY.1	PY.2	PY.3	PY.4	PY.5
PY.1	1.000	.604	.390	.475	.652
PY.2	.604	1.000	.398	.338	.671
PY.3	.390	.398	1.000	.688	.527
PY.4	.475	.338	.688	1.000	.697
PY.5	.652	.671	.527	.697	1.000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.272	4.180	4.340	.160	1.038	.004	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PY.1	17.08	2.973	.641	.483	.833
PY.2	17.06	3.119	.602	.559	.842
PY.3	17.10	2.827	.617	.508	.841
PY.4	17.18	2.722	.693	.672	.819
PY.5	17.02	2.673	.809	.720	.788

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628 ^a	.395	.382	1.633

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.522	1	83.522	31.321	.000 ^b
	Residual	127.998	48	2.667		
	Total	211.520	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.489	2.667		2.433	.019
	X	.709	.127	.628	5.597	.000

a. Dependent Variable: Y

BIOGRAFI PENULIS



Indasari Moncong panggilan Inda lahir di Makassar pada tanggal 4 Mei 1995 dari pasangan Bapak Moncong Tiro dan Ibu Darna. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Pannampu RT/RW 001/003 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 36 Kapita lulus tahun 2009, SMP Negeri 2 Bangkala lulus tahun 2012, SMA Negeri 4 Jeneponto lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).

